

PERAN WORLD FOOD PROGRAMME (WFP) DALAM MEMBANTU INDONESIA MENANGANI ISU KEAMANAN PANGAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PADA TAHUN 2005-2009

Agung Christopher Arthur Yoseph¹⁾, Sukma Sushanti²⁾, Putu Titah Kawitri Resen³⁾

¹⁾²⁾³⁾Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: agung.christopher@yahoo.com¹⁾, sukmasushanti@gmail.com²⁾, kawitriresen@yahoo.co.id³⁾

ABSTRACT

East Nusa Tenggara is a Food Insecurity Province in Indonesia in 2000-2005 and that's make that issue is important in that country. World Food Program (WFP) is an International Organization Agency that provides food assistance when the issue of Food Security in Indonesia occurs. WFP collaborates with the Indonesian government to build programs to create appropriate food security conditions in vulnerable areas such as East Nusa Tenggara. WFP plays a full role in its assistance to national and regional governments which the government believes can be a solution to solve these food problems. This study focused on explanation of the role of international organizations such as WFP in helping Indonesia solve food security issues in one of the provinces in Indonesia, namely NTT, and purpose of this study also present a descriptive analysis of roles and functions of international organizations in helping countries face national food security issues.

Keywords : World Food Programme, Food Security, Internasional Organization, East Nusa Tenggara

1. PENDAHULUAN

Isu keamanan pangan saat ini banyak menjadi perhatian di berbagai negara, termasuk Indonesia. Masalah pangan menjadi isu nasional di Indonesia karena Indonesia termasuk negara berkembang. Indonesia juga masih mengandalkan sektor pertanian sebagai salah satu komoditas negara. Hingga saat ini, masalah keamanan pangan menjadi sesuatu yang penting di Indonesia. Simpanan yang terbatas, harga dari bermacam komoditas pangan menembus level yang sangat mengawatirkan pada tahun 2005. (Badan

Pusat Statistik, 2005). Dibandingkan dengan tahun 2000, harga seluruh pangan meningkat sampai 75% dan beberapa komoditas bahkan meningkat hingga 100%. Komoditas utama daerah-daerah timur yang rawan akan permasalahan pangan seperti jagung, kedelai, dan gandum mencapai rekor tertinggi ditahun tersebut. (World Food Programme Brochure, 2010)

Provinsi Nusa Tenggara Timur tercatat sebagai contoh nyata wilayah di Indonesia

yang memiliki resiko rawan pangan yang sangat tinggi, karena di beberapa daerah tertentu masyarakat kesulitan untuk mendapat pangan yang layak. Sejak tahun 60-an sampai pada awal tahun 2000-an, laporan langsung pemerintah setempat di NTT senantiasa memberikan tiga alasan utama, mengapa masyarakat disana kesulitan mendapat pangan yang layak. Alasan pertama ialah sumber daya manusia petani yang kurang tinggi karena factor pendidikan mereka. Kedua, teknologi yang minim dan kurang update. Dan yang Ketiga, curah hujan yang dapat dikategorikan kekeringan. Ketiga alasan tersebut berkaitan dengan satu keadaan utama masyarakat di NTT yaitu kemiskinan. (Yana, 2016).

Kemiskinan menjadi momok dalam kehidupan pangan di NTT, rata-rata kemiskinan yang terjadi di NTT mencapai 28,19 persen. Angka ini bersaing dengan Papua yang merupakan wilayah termiskin di Indonesia saat itu dan Aceh pasca bencana alam tsunami tahun 2004. (BPS,2005). Indeks Pembangunan Manusia provinsi NTT meningkat secara bertahap di tahun 2000-2005, tetapi indeks pendapatan sedikit dan angka kekurangan gizi yang tinggi membuat mereka menjadi salah satu yang terburuk di Indonesia pada tahun 2005 perihal pangan.

Keadaan rawan pangan di wilayah-wilayah di Indonesia khususnya di Nusa Tenggara Timur menjadi perhatian banyak kalangan, salah satunya ialah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Anggota PBB bergerak dalam menangani masalah pangan dengan memberi

bantuan program yang dikomandoi oleh FAO. WFP merupakan turunan dari FAO yang beroperasi pada tahun 1963. Organisasi ini bertujuan untuk menjadi jalan keluar dalam permasalahan pangan. Secara tidak langsung World Food Programme akan melaksanakan program yang sudah disepakati oleh FAO.

Indonesia adalah contoh negara yang mendapat bantuan saat WFP pertama kali beroperasi. Tersedianya kantor WFP di Jakarta menandakan adanya hubungan erat antar Indonesia dengan Organisasi Internasional tersebut. Buruknya status gizi pada krisis ekonomi yang melanda Indonesia membuat mereka sempat keluar dari WFP pada tahun 1996. Indonesia kembali bekerja sama dengan WFP yang ditandai dengan diperolehnya bantuan WFP dalam bentuk Emergency Operation yang dan program penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat wilayah mereka. (World Food Programme Brochure, 2013).

Khusus di wilayah Nusa Tenggara Timur, World Food Programme (WFP) pertama kali melakukan kerja sama dengan Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi NTT dan menghadirkan program Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang diawali tahun 2004. Program ini diluncurkan dengan 3 edisi yang dimulai tahun 2004 sampai pada edisi terakhir di tahun 2005. Peta ini menggambarkan situasi ketahanan pangan dan bagaimana kerentanan melanda yang sangat rinci sampai hingga tingkatan Kecamatan. Program ini melihat beberapa indikator seperti akses, penyediaan dan pemanfaatan sumber makanan. Hasil yang

dilihat akan dapat dirasakan dalam kurun waktu 5 tahun. (World Food Programme Brochure, 2010). WFP dalam pembuatan programnya selalu menganalisis kondisi pangan di daerah tersebut yang nantinya akan dikategorikan rawan pangan kronis atau sementara (Anita, 2013).

Rawan Pangan Kronis adalah keadaan masyarakat yang mengalami kerawanan pangan yang mayoritas diakibatkan oleh sumber daya yang ada disana. Sedangkan, Rawan Pangan Transient atau Sementara adalah keadaan yang mendadak terjadi sepanjang waktu. Hal ini dapat dikategorikan sebagai bencana alam maupun kekeringan akibat musim yang berganti. Indikator yang digunakan dalam kedua rawan pangan ini berbeda, perbedaan terletak pada aspek masalah kesehatan pada kronis dan kemiskinan, sedangkan rawan pangan sementara lebih berfokus pada iklim atau kondisi alam yang tidak menentu (Elin, 2008). Pada awal tahun 2000-an sampai dengan 2005, NTT masuk ke kategori rawan pangan kronis.

Melihat adanya permasalahan kemiskinan yang berperan besar terhadap isu keamanan pangan di NTT, penelitian ini akan berfokus pada peran dan fungsi WFP dalam membantu pemerintah Indonesia khususnya pemerintah NTT untuk menangani adanya isu keamanan pangan (food security). Penelitian ini akan berfokus pada tahun 2005, dimana di tahun tersebut NTT mengalami keadaan rawan pangan kronis dan memiliki kerawanan masalah kemiskinannya serta kesulitan memenuhi

kebutuhan pangan yang layak (Siregar, 2008) sampai dengan tahun 2009 dimana terdapat dampak signifikan dari program-program kerjasama pemerintah Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan World Food Programme (WFP).

2. KAJIAN PUSTAKA

Penulis menjadikan tulisan dari mahasiswa Universitas Riau yang bernama Dorma Elvrianty Sirait sebagai yang pertama.. Penelitian ini berjudul "Peran UNICEF Dalam Menangani Perekrutan Tentara Anak (Child Soldiering) Di Myanmar Pada Tahun 2007-2013". Dalam penelitiannya penulis menjelaskan peran dari organisasi internasional yaitu UNICEF di Myanmar. Lokasi dari penelitian ini adalah 2007 sampai 2013. Analisa penelitian menjelaskan bahwa UNICEF selaku organisasi internasional mampu memberikan pengaruh kepada salah satu isu Hak asasi, yaitu pembuatan prajurit di Myanmar yang nantinya digadang-gadang untuk menjadi tentara militer, bahkan sampai ke hal-hal yang tidak layak.

Myanmar adalah contoh negara tempat praktek perekrutan tentara anak yang memang terjadi di berbagai negara di dunia ini. Konflik domestik yang berlarut-larut menjadi alasan utamanya. Konflik tersebut menggiring anak-anak yang berada di bawah umur untuk terlibat sebagai korban bahkan sebagai pelaku. Semua dimulai ketika adanya kebutuhan terdesak yang membuat Myanmar melakukan program militer sejak dini. Hal tersebut tidak berjalan dengan baik 100% karena muncul banyak

permasalahan yang salah satunya berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Berbagai cara dalam penghapusan sudah sempat dilakukan di Myanmar. Dewan PBB juga mengancam akan memberi sanksi jika jumlah perekrutan tentara anak tidak menurun. Myanmar mulai menunjukkan komitmennya dengan menandatangani Joint Aksi Plan tahun 2007 hingga 2012 bersama dengan UNICEF. Program ini tidak serta merta menghapus adanya pemberdayaan anak dibawah umur untuk militer, karena masalah berat justru terjadi saat proses reintegrasi. PBB dengan UNICEF khususnya gencar memberikan bantuan-bantuan berupa program yang memiliki tujuan utama menghapuskan tindakan pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar tersebut.

Dalam penelitian Ini , organisasi internasional memiliki peran penting dalam sebuah permasalahan internasional. UNICEF mampu menjadi jembatan yang mampu menganalisis serta memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Peran Organisasi internasional menjadi titik utama dimana mereka mampu memainkan peran sebagai aktor yang tidak terikat pada instrument-instrumen lainnya.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis buat ini dapat dilihat dari perlangsungan, jenis bantuan dan tempat yang diambil, yang menggambarkan bahwa dalam tiap negara memiliki tingkat permasalahan yang beragam. Berbagai aspek permasalahan dalam suatu

Negara ialah permasalahan pangan, tempat, kesehatan , anak dan lain-lain. Salah satu konsep yang dia pakai dalam penelitian ini adalah organisasi internasional atau Organisasi Antarpemerintah (IGO). UNICEF mampu memainkan peran dalam memperjuangkan hak-hak anak sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi dasar dan mengakhiri keberadaan tentara anak-anak di Myanmar. Dalam penelitian ini UNICEF tidak berperan dalam penyelesaian masalah 10 anak di salah satu sektor pekerja anak seperti militer.

Dalam jurnal eJournal Ilmu Hubungan Internasional 2013 yang berjudul "Peran World Food Programme (WFP) dalam menangani Krisis Pangan di Somalia Tahun 2007-2009", Nita Anggeriani menggarisbawahi alasan krisis pangan yang terjadi di beberapa negara dan di negara berkembang secara umum. Pada tahun 1970 Somalia mengalami kemunduran makanan. Pada 2007, jumlah yang diterima mencapai 80% dari jumlah orang yang terkena. Bantuan diberikan oleh Program Pangan Dunia yang bertujuan menangani masalah dan menaikkan pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Kondisi Somalia sejak jatuhnya Siad Baree pada 1991. PerserikatannBangsa-Bangsa (PBB) memberi informasi bahwa anak-anak yang mengalami kurang gizi hingga menapai 30% dan lebih besar dari Somalia. Dimungkinkan untuk memasuki Program Pangan Dunia ke Somalia pada tahun 1971 dan mulai beroperasi di wilayah tersebut. Peran dan Fungsi Organisasi internasional menjadi kesamaan penelitian ini. WFP sebagai

organisasi internasional menjadi jembatan dan jalan keluar masalah pangan yang dihadapi di suatu negara, khususnya negara-negara berkembang sampai yang tidak maju.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian berjenis kualitatif deskriptif yang menjelaskan tentang bagaimana peran World Food Programme (WFP) dalam membantu pemerintah Indonesia menangani isu keamanan pangan di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2005-2009

Data sekunder adalah jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Sumber data sekunder berarti data yang didapat merupakan data yang tidak berasal langsung dari informan tapi merupakan data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dan memiliki koneksi dengan permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini baik yang berasal dari sumber – sumber literatur seperti buku, jurnal, artikel, dokumen dan surat kabar.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan berfokus pada buku, laporan dan literatur yang berhubungan erat dengan penelitian. Data yang penulis peroleh dari penulisan ini bersumber dari buku-buku, web resmi Pemerintah, jurnal ilmiah serta artikel berita.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

World Food Programme adalah organisasi internasional yang bergerak khusus di bidang pangan. Mekanisme yang dijalankan oleh WFP sesuai mandat yang melekat padanya, yakni memberikan bantuan ketika terjadi krisis pangan dengan atau tanpa permohonan dari negara asal isu pangan terjadi. WFP berupaya meletakkannya di tengah-tengah agenda internasional, kebijakan negara, strategi, dan operasi yang nantinya disetujui yang secara langsung bermanfaat bagi kaum miskin dan difasilitasi. Ketika bencana terjadi, kedua bencana itu terjadi akibat bencana alam yang terjadi akibat aktivitas manusia, dan terdampak yang akan diberi pertolongan pertama adalah korban yang diterima. Sejak WFP dibentuk, banyak operasi telah dilakukan untuk menjalankan misinya dalam mengatasi pelarian global, krisis pangan, dan membantu mencapai ketahanan pangan dunia di berbagai belahan dunia. (Shaw,2001). Indonesia merupakan negara tempat dimana WFP berkolaborasi dengan pemerintah untuk memerangi rawan pangan.

Rawan Pangan merupakan suatu hal yang lazim terjadi di daerah-daerah yang berada di negara berkembang. Nusa Tenggara Timur merupakan contoh daerah di Indonesia yang terindeksi isu keamanan

pangan. WFP dan Dewan Ketahanan Pangan Indonesia pada tahun 2004-2005 melakukan analisis pada wilayah rawan pangan dan gizi yang mengkhawatirkan sampai tingkat Kabupaten dengan menggunakan indikator pelaksana yang sesuai dengan program mereka. Hasil pemetaan terdapat 100 Kabupaten dari 265 Kabupaten di Indonesia yang termasuk rawan pangan dan gizi kronis. NTT berada di 3 besar daerah yang berstatus rawan pangan kronis.

Penyebab rawan pangan dan gizi kronis di atas terutama faktor kemiskinan karena kepemilikan lahan yang sempit, sementara lapangan kerja non pertanian belum berkembang. Penyebab lain adalah: keterbatasan sumberdaya air dan meluasnya areal lahan kritis, keterbatasan pasar output pertanian dan hasil industri rumah tangga, akses rumah tangga terhadap sumber permodalan untuk usaha terbatas, pengetahuan dan ketrampilan tenaga kerja rendah, kondisi infrastruktur dan sarana transportasi tidak memadai.

4.2 Peran WFP terhadap Keamanan Pangan di NTT

Pasca krisis ekonomi 1998, beberapa daerah di Indonesia khususnya di daerah timur diterpa isu keamanan pangan. Kelayakan gizi pangan menjadi salah satu masalah yang difokuskan pemerintah saat itu. Bertujuan membantu intervensi yang

berhubungan dengan Food Security, Pemerintah Indonesia terus meningkatkan fasilitas untuk mencapai target intervensi untuk tujuan geografis. Pada tahun 2003 Dewan Keamanan Pangan (DKP), diketuai langsung oleh Presiden Republik Indonesia, tekhususnya sekretariat DKP dalam Pangan Badan Keamanan (BKP), membantah dengan WFP dalam membuat Peta Kerawanan Pangan atau *Food Insecurity Atlas* (FIA) tingkat nasional. (Dewan Ketahanan Pangan NTT, 2010)

Program FIA pertama kali muncul pada 2005 dengan 264 kabupaten di 30 provinsi. Lebih dari US \$ 25 juta telah dialokasikan dari anggaran pemerintah untuk membantu 100 kabupaten yang dimulai pada 2006-2007. (WFP, 2010). Selain program pemetaan FIA dan FSVA, WFP juga mengatur persiapan untuk program Makanan Untuk Aset. Program ini akan membahas tentang pemberdayaan masyarakat dalam kondisi dan kondisi infrastruktur.

4,2,1 Peran WFP sebagai Aktor

Peran sebagai aktor pada diri WFP terlihat dari bagaimana mereka menganalisis segala kemungkinan dan peluang dalam penyelesaian masalah keamanan pangan. Dalam pembuatan Peta Kerawanan Pangan, pemerintah mempercayakan kepada tim analisis WFP yang bekerja dalam melakukan beberapa analisis mendalam terhadap situasi dan kondisi rawan pangan. Pekerjaan mereka menginformasikan kebijakan dan program yang

WFP adopsi untuk memerangi kelaparan dalam situasi yang berbeda. (*WFP Fact & Figure*, 2007). Analisis keamanan makanan untuk menentukan persetujuan untuk kelaparan dan makanan yang tidak aman untuk mengatur penyebabnya. WFP bekerja dengan mitra untuk mengembangkan Sistem Pemantauan Keamanan Pangan (FSMS). Buletin, laporan, dan koleksi yang dihasilkan dari semua kegiatan ini bersifat public dan dapat dibeli dari Bank Penilaian Keamanan Pangan. (Indriana, 2016)

Peta Kerawanan Pangan yang telah dibuat WFP dan Badan Ketahanan Pangan NTT, memberikan analisis keamanan pangan di tingkat kecamatan dan kabupaten yang dibahas dalam 3 element, yaitu distribusi makanan, akses makanan, dan pemanfaatan makanan. Peta ini juga menyajikan analisis alam untuk kesiapan yang lebih baik. Rekomendasi dan strategi untuk menangani kerawanan pangan tersedia di tingkat kabupaten khususnya daerah yang masuk ke kategori rawan pangan. Kategori rawan pangan sendiri dilihat dari proses analisis yang berkaitan dengan beberapa indikator seperti kemiskinan, pangan dan gizi, infrastruktur dan curah hujan. (Dewan Ketahanan Pangan, 2010)

Dalam laporan "FSVA 2009" yang ditulis oleh Dewan Ketahanan Pangan pada tahun 2010, FSVA daerah menyediakan jalan bagi pengambilan kebijakan dalam hal penentuan sasaran dan menawarkan rekomendasi untuk intervensi kerawanan pangan dan gizi di tingkat kabupaten dan

kecamatan. Pemerintah Provinsi NTT menggunakan program FIA 2005 dan FSVA 2009 untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Pemerintah memanfaatkan informasi yang tersedia pada peta tersebut untuk menggarap Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi NTT pada tahun 2012.

4.2.1 World Food Programme berperan Sebagai Arena

Dari statistik WFP tahun 2004, bantuan-bantuan yang diberikan kepada Indonesia selaku Negara anggota kurang lebih berasal dari Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Australia dan sebagian eropa (Ndaru, 2005). Negara-negara tersebut adalah pemasok dana dan bantuan makanan terbesar. Bantuan dari Negara anggota tersebut nantinya akan digunakan untuk membantu pembuatan program di Negara berkembang seperti Indonesia. Dalam laporan WFP tahun 2005, tercatat Amerika Serikat menjadi penyumbang terbesar untuk WFP. Disusul beberapa Negara maju di Eropa dan Australia. Jepang menjadi satu-satunya Negara asia yang mampu bersaing dalam 10 besar pemberi kontribusi terbesar.

Bantuan dari Negara-negara maju tidak serta membuat WFP tenang dalam pendistribusian bantuan ke Negara-negara dengan tingkat urgensi yang tinggi dalam kerawanan pangan. WFP selalu berhati-hati dalam bertindak karena Negara-negara

pendonor sejauh ini meletakkan kepentingan nasional masing-masing dalam elemen utamanya. Dalam beberapa contoh kasus rawan pangan internasional, hal-hal semacam ini membuat terhambatnya WFP dalam pendistribusian bantuan kepada Negara-negara anggota lainnya (Ndaru, 2005).

Menurut laporan WFP dalam “WFP Indonesia 2012 Review” dijelaskan bahwa World Food Programme dan Pemerintah Indonesia menjalankan Rencana Aksi Negara dan membuat komitmen historis untuk pelaksanaan beban biaya (pembagian biaya). Ini menunjukkan bahwa ada perubahan hubungan antara pemerintah tuan rumah dari hubungan donor penerima ke kemitraan strategis. *Cost Sharing* yang dilakukan pemerintah nasional dengan WFP juga terjadi pada pembuatan *program Food Insecurity Atlas Nasional 2005* dan *Food Security and Vulnerability Atlas 2010* yang bersifat lebih detail pembangunan ketahanan pangan daerah.

Dijelaskan dalam laporan Peta Ketahanan pangan 2005 bahwa sejak tahun 2003, WFP telah memberikan dukungan berbasis anggaran dan teknis untuk pembuatan dan penerapan FIA dan FSVA. Pemerintah Indonesia sendiri merespon program tersebut dengan gencara memberikan support dana pada daerah yang sudah teridentifikasi oleh FIA nasional yang memetakan daerah-daerah yang memerlukan bantuan. (Dewan Ketahanan Pangan, 2010).

WFP mampu menjadi solusi di bidang anggaran di saat Indonesia sedang bertumbuh

pasca krisis ekonomi 1998. Dengan adanya bantuan dana, WFP menjadi sebuah perantara negara-negara anggota yang tergolong maju untuk ikut berpartisipasi dalam perbantuan khususnya bantuan dana untuk pembuatan program serta bantuan langsung berupa logistik dan bahan makanan. (Novrida, 2009).

Selain bekerjasama secara langsung dengan pemerintah, WFP juga melakukan kerja sama dengan Mitra Swasta. Kontribusi sektor swasta seperti yayasan, perusahaan dan individu hadir dalam bentuk uang tunai, atau proyekk tertentu, kegiatan pemasaran dengan kampanye misi sosial / penggalangan dana untuk meningkatkan modal untuk WFP melalui penjualan produk atau dalam bentuk hasil. DSM, TNT, Unilever, dan Yum Group! adalah contoh perusahaan yang bermitra global yang memberikan dukungan untuk terlaksananya program WFP di Indonesia (Novrida, 2009).

Pada tahun 2007 WFP mendapatkan dukungan dari Unilever sebesar US \$ 26 juta dan pada tahun 2014 atas bantuan Unilever, WFP diperkirakan mampu untuk memberikan lebih dari 5 juta makanan sekolah di negara-negara dunia (Unilever, 2017). Sumbangan dan kontribusi yang dapat dilakukan secara individu atau pribadi yaitu dengan memberikan ransum makanan darurat saat terjadi krisis, makanan khusus untuk anak-anak di sekolah yang kelaparan, menggunakan makanan sebagai bayaran/upah bagi mereka yang bekerja untuk membangun kembali infrastruktur yang rusak akibat konflik maupun bencana alam, seperti membangun kembali sekolah-sekolah, jalanan,

jembatan dll. Bantuan dari unilever ini dikontribusikan juga kepada program di NTT yaitu pembuatan FSVA yang dimulai tahun 2008 dan diluncurkan setahun berikutnya.

Di Nusa Tenggara Timur, WFP secara khusus bekerjasama dengan Indofood. Dengan adanya kerjasama dengan Indofood, WFP telah menjalin kerjasama pada program yang menyoar pada masyarakat rawan gizi di Provinsi NTT melalui penyediaan bahan pangan yang difortifikasi, diperkaya dengan asupan gizi. (*WFP Publication*, 2012). Hal ini berkaitan dengan salah satu indikator utama perubahan pada Food Security di NTT yaitu Situasi Gizi. Situasi gizi merupakan salah satu indikator yang mendapat perhatian khusus dalam Food Security. Walaupun tidak signifikan akses mendapatkan makanan, situasi gizi mampu menjadi isu yang difokuskan untuk diperbaiki dari adanya kerjasama WFP-Pemerintah NTT.

Peran WFP sebagai arena juga tidak lepas dari salah satu fungsi organisasi internasional menurut Clive Archer (2001) yaitu fungsi informatif. WFP dapat memberikan informasi seputar dunia internasional pada negara anggota. Hal ini dapat memudahkan Indonesia pada saat terjadinya isu-isu nasional seperti isu keamanan pangan. Indonesia juga berkontribusi dalam pendanaan program WFP di negara lain yang membuat posisi Indonesia di mata dunia menjadi lebih baik. Kerjasama yang dijalin akan memberikan kepositifan bagi dua belah pihak karena hubungan mutualisme perihal pendanaan dan kontribusi internasional.

Sebagai Negara pendonor, Indonesia tidak serta merta selalu mengutamakan Negara-negara anggota lain yang terkena musibah rawan pangan. Indonesia mempunyai hak untuk mengutamakan kepentingan nasionalnya (Ndaru, 2005). Indonesia sebagai Negara berkembang berfokus pada penyelesaian isu nasional yang terjadi di Negara sendiri. WFP sendiri lebih banyak memanfaatkan bantuan-bantuan logistik maupun dana dari Negara maju untuk disalurkan ke Negara-negara yang membutuhkan. Hal ini juga tidak sepenuhnya berada di kewenangan WFP selaku organisasi internasional, dikarenakan Negara-negara pendonor juga memiliki kepentingan-kepentingan dalam pemberian bantuan tersebut. Informasi yang didapat dari adanya pergerakan anggota organisasi nantinya akan disalurkan kepada anggota.

5. KESIMPULAN

Khususnya di NTT, kecamatan membutuhkan prioritas multi-sektoral khususnya menanggulangi masalah kemiskinan. Peta edisi kedua dibuat pada tahun 2009 yang berganti nama menjadi Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA). Selain FSVA. Padat karya difokuskan pada kegiatan untuk menumbuhkan semangat gotong royong sehingga bagaimana akses ekonomi dapat dijamin dalam rangka meningkatkan tingkat ekonomi dan kemakmuran masyarakat yang mandiri. WFP sebagai organisasi internasional juga memiliki peran dan fungsi yang signifikan terhadap isu keamanan pangan di NTT ini. Pemerintah

mempercayakan WFP sebagai aktor untuk membuat analisis yang nantinya akan digunakan dalam skala nasional sampai daerah.

FSVA atau Peta Ketahanan Pangan adalah bentuk nyata dari tim analisis WFP yang bersifat informatif untuk tujuan ketahanan pangan khususnya di daerah Nusa Tenggara Timur. Pemerintah NTT memberikan keleluasaan penuh kepada WFP dalam menganalisis serta menjabarkan dalam bentuk peta yang nantinya akan mempengaruhi pemerintah provinsi NTT dalam pembuatan kebijakan. Secara tidak langsung, program-program hasil kolaborasi WFP dengan Pemerintah Indonesia dan daerah menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan baru dalam penanganan isu pangan di Indonesia khususnya di NTT.

WFP juga memiliki peran sebagai arena yang membuat mereka mampu memikat pihak lain untuk berkontribusi. WFP tidak hanya bekerja sama dengan pemerintah setempat, mereka juga melakukan kerjasama dengan Kemitraan Swasta. Kerjasama dengan Indofood adalah contoh bagaimana WFP mampu mendulang dana serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat perihal akses pangan dan situasi gizi. WFP juga membuat program *Food For Asset* yang bertujuan memberikan edukasi tentang pengelolaan aset dan infrastruktur pedesaan yang menguntungkan bagi komunitas mereka. Dalam skala internasional, WFP berperan sebagai arena atau wadah yang menjadi perantara negara-negara anggota

untuk saling berkontribusi. WFP memiliki mekanisme pendanaan terbesar yang berasal dari pemerintah negara-negara anggota. Dengan adanya program di negara berkembang seperti Indonesia, Negara-negara lain secara tidak langsung ikut berkontribusi dari segi pendanaan maupun bantuan logistik.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Archer, Clive. 2001. *International Organizations Third Edition*. London : Routledge 11 New Fetter Lane
- Anggeriani, Anita. 2013. *Peran World Food Programme Dalam Menangani Krisis Pangan di Somalia tahun 2007-2009*. E-Jurnal Hubungan Internasional
- Damardonso, Haryo dan Hermas E. Prabowo .2008. *Irigasi Sempurna, Swasembada Pangan Tercapai*. Kompas, Bisnis & Keuangan.
- Dewanti, Elin. 2008. *Peranan World Food Programme Melalui Program Food For Assets (FFA) Dalam Upaya Mengurangi Potensi Raawan Pangan di Indonesia (Studi Kasus : Nusa Tenggara Barat 2008-2010)*. FISIP Universitas Komputer Indonesia
- Elvrianty, Drma. 2014. *Peran UNICEF Dalam Menangani Perekrutan Tentara Anak (Child Soldiering) Di Myanmar Pada Tahun 2007- 2013*. Universitas Riau
- Keanggotaan Indonesia di World Food Programme. Melalui <http://www.deptan.go.id>
- Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Novrida, Amelia. 2009. *Peran UN World Food Programme (WFP) Dalam Menangani Krisis Pangan di Indonesia 1998-2007*. Universitas "Veteran" Jakarta

Santosa, Dwi Andreas. 2008. Krisis Pangan 2008. Kompas. 15 Maret, halaman 6

Syarief, Hidaayat, Hardinsyah dan Sumali, 1999. Membenahi Konsep Ketahanan Pangan Indonesia. Thaha, Hardinsyah dan Ala. Pembangunan Gizi dan Pangan Dari Perspektif Kemandirian Lokal. Perhimpunan Peminat Gizi dan Pangan (PERGIZI PANGAN) Indonesia dan Center For Regional Resource Development & Community Empowenment. Bogor.

Sentosa, Dwi Andreas. 2008. Krisis Pangan 2008. Kompas. 15 Maret, halaman 6

WFP brochure. 2013. Membangun Ketahanan Pangan Indonesia.

WFP. Food Security and Vulnerability Atlas of Indonesia Brochure, 2009.

Yana, Ira Fitri. 2016. Tingkat Ketahanan Pangan Terhadap Rawan Pangan dan Gizi Buruk di NTT. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta